

Analysis The Effect of Regional Expenditure on Economic Growth and Community Welfare in Semarang City 2018-2022

Dita Idfi Pangestu¹ , Dyah Mutiarin², Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro³

¹ Department of Government Affair and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

² Department of Government Affair and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

³ Department of Government Affair and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

 ditaidfiii@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the economic growth and welfare of the people of Semarang City from 2018 to 2022 through the coordination of regional spending. A literary study was used in this research, with five main points of discussion: personnel expenditures, capital, goods and services, grants, and social assistance. According to the study's findings, economic growth is linked to regional spending, with personnel, capital, and social assistance spending all having a positive impact on economic growth. However, several points of regional spending have a less good impact on increasing economic growth in the city of Semarang. Meanwhile, on the public welfare side, regional spending has a positive influence. The influence is obtained on personnel spending, capital, and grants. Each budget has a way to improve welfare such as the construction of a structure that can open job vacancies to impact people's welfare. With this, the local government must strive to optimize regional spending so that there is significant economic growth and an increase in people's welfare in the city of Semarang.

Keywords: Regional Expenditure; Economic growth; Public welfare

Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2018-2022

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang periode tahun 2018 hingga 2022 dengan keserasian belanja daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur dengan menggunakan lima pokok pembahasan yang memuat belanja pegawai, modal, barang dan jasa, hibah serta bantuan sosial. Hasil penelitian mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterhubungan dengan belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang memiliki dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa poin dari belanja daerah yang memiliki dampak kurang signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Sedangkan, pada sisi kesejahteraan masyarakat, belanja daerah memiliki pengaruh yang positif. Pengaruh tersebut didapat dari adanya belanja pegawai, modal dan hibah. Adapun masing-masing anggaran tersebut memiliki cara untuk meningkatkan kesejahteraan seperti salah satunya melalui restrukturisasi pembangunan yang dapat membuka lowongan kerja sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan hal ini maka pemerintah daerah harus berupaya untuk mengoptimalkan belanja daerah agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan serta terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Kata kunci: *Belanja Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat*

1. Pendahuluan

Proses dalam meningkatkan kondisi perekonomian pada suatu daerah atau negara dalam kurun waktu yang telah ditentukan dinamakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Permasalahan makro yang selama ini menjangkiti berbagai macam Pemerintah Daerah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang dialami setiap periodenya. Namun apabila suatu daerah mengalami perkembangan maka akan berimbas terhadap daerah lain secara positif. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah mempunyai hubungan yang erat terkait dengan adanya peningkatan nilai barang maupun jasa yang dinilai dengan PDB nasional dan daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menjadikan salah satu indikator dalam melakukan analisis terkait dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang terjadi pada daerah (Imamah, 2018). Untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu daerah, pemerintah daerah dituntut memiliki strategi untuk para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan produktifnya dengan menciptakan iklim yang kondusif.

Strategi dalam kerangka implementasi otonomi daerah serta desentralisasi fiskal niscaya dapat memberikan dimensi tata kelola pemerintahan daerah yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Zamzami & Rahmadi, 2021). Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi sendiripun sangat dibutuhkan disuatu negara maupun daerah, pembangunan ini dilakukan dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Terkait dengan langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di daerahnya. Pemerintah dalam melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi melakukan strategi yang memiliki sifat umum dan tidak memihak manapun atau netral, seperti peningkatan akses layanan kesehatan maupun pendidikan dalam rangka pelayanan publik optimal terhadap masyarakat dan diiringi dengan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan laju arus barang, orang, maupun informasi.

Kajian (Sukmawati, 2016) mengindikasikan bahwa merujuk kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa daerah ini diproyeksikan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang memiliki perkembangan yang pesat. Berdasarkan pada hasil analisa tersebut mengindikasikan bahwa sektor jasa dan perdagangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Semarang. Adapun pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang sendiri pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,73% dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yakni sebesar 5,16% (Semarang, 2022). Pertumbuhan tersebut didapatkan dari sektor produksi yang disumbang melalui lapangan usaha perdagangan dan transportasi sebesar 79,01%. Namun dari segi pengeluaran angka kenaikan tertinggi tercatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5%. Hal ini disinyalir membuktikan bahwa struktur ekonomi Kota Semarang Tahun 2022 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yakni sebesar 28,85%.

Dalam kurun waktu satu tahun penuh tersebut, ekonomi Kota Semarang dari segi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5% dengan diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,96%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,59% dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,27%.

Pada sisi lain, Pemerintah Kota Semarang dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan bertindak secara alokatif dalam pelaksanaan kebijakan yang mengarahkan belanja daerah ke sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini harus dilaksanakan secara efektif, dengan alokasi berupa biaya pegawai, biaya modal, barang jasa, biaya hibah, dan bantuan sosial. Untuk melihat proporsi belanja daerah pada pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.

Belanja	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Belanja Pegawai	89.54	89.61	80.87	109.22	74.90	88.82%
Belanja Modal	76.22	86.80	48.12	87.49	55.12	70.75%
Belanja Barang dan Jasa	95.34	93.89	81.86	95.53	74.74	88.28%
Belanja Hibah	96.81	86.44	93.68	120.79	40.46	87.63%
Belanja Bantuan Sosial	66.79	46.14	42.07	142.10	63.84	72.18%

Gambar 1. Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Dilihat dari alokasi belanja daerah Kota Semarang kurun waktu 2018-2022 masih jauh dari kata sempurna. Dilihat dari proporsi anggarannya, belanja pegawai menduduki angka relative tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal maupun bantuan sosial. Dapat dilihat gambar 1. tersebut diketahui bahwa proporsi belanja pegawai Kota Semarang pada tahun 2018-2022 sebesar 88.82% dan proporsi belanja modal sebesar 70.75%. Sedangkan belanja barang dan jasa memiliki proporsi sejumlah 88.28%. Kemudian belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun 2018-2022 memiliki proporsi dengan rata-rata 87.63% dan 72.18%. Dengan adanya data proporsi belanja daerah Kota Semarang pada taun 2018-2022 dapat dikatakan bahwa belanja daerah Kota Semarang belum menunjukkan kualitas yang baik. Dilihat dari besarnya proporsi belanja pegawai dengan rata-rata 88.82% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal yang hanya berkisar pada angka 70.75%. Hal ini dapat dikatakan bahwa belanja daerah dalam pemenuhan kebutuhan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat belum memberikan efek yang baik. Dengan adanya dampak tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2018-2022”, yang memiliki tujuan mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana belanja daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Semarang.

2. Literatur Review

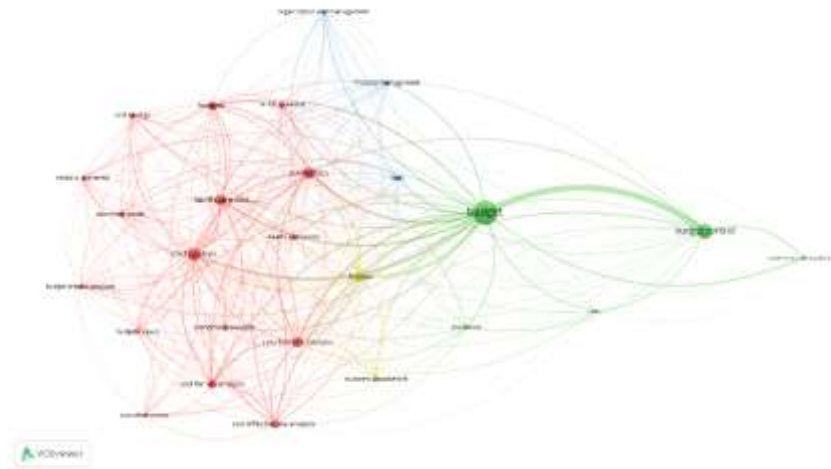
Menurut (Marunta, 2021), APBD didefinisikan sebagai elemen dasar dalam mengolah keuangan daerah yang memiliki masa anggaran 1 tahun terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember. APBD tersebut disusun untuk meningkatkan daerah serta mensejahterahkan masyarakat. Adanya APBD, membuat daerah dapat memaksimalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya dan juga membelanjakan dana tersebut sesuai dengan program kegiatan yang telah disepakati oleh pemerintah daerah setempat. Tentunya dalam melakukan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman yang dimiliki daerah (Mudhofir et al., 2018). Didalam APBD terdapat lima fungsi, yaitu

fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi menurut Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2006 (Suhaedi, 2019). (Makka et al., 2015) kaitannya dengan belanja daerah, APBD memiliki pengaruh penting untuk mengetahui pemerintah dalam menggunakan anggarannya. Sejauh mana pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk menghindari pengeluaran yang tidak berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya system anggaran yang berbasis kinerja, maka secara mutlak pemerintah harus melakukan penghematan belanja dalam diri pegawai pemerintah. Hal ini tentunya pemerintah tidak perlu berorientasi menghabiskan anggaran yang dapat melakukan pemborosan, namun pemerintah harus berorientasi pada output maupun outcome anggaran belanja daerah.

(Taher et al., 2019) menjelaskan terkait dengan anggaran pendapatan daerah yang sudah dialokasikan menjadi sumberdaya keuangan daerah harus dikelola secara efektif dan efisien dalam rancangan pembangunan daerah. Alokasi ini tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Adanya alokasi belanja daerah yang tinggi dalam APBD maka akan menyebabkan semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang dituju sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat (Putri, 2021). Selain itu, menurut (Lamaya & Mei, 2021) APBD juga dapat digunakan sebagai sebuah instrument dasar dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah sebagai alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran.

Kemudian terdapat pembahasan terkait dengan teori kebijakan makro, di mana dalam teori tersebut membahas terkait dengan peran pemerintah dalam mempengaruhi permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri diartikan sebagai jumlah total uang yang dihabiskan oleh masyarakat secara keseluruhan untuk membeli barang dan jasa (Deswanto et al., 2017). (Krismajaya & Dewi, 2019) pertumbuhan ekonomi yaitu indikator yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, yang menyebabkan setiap negara memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ini pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah, di mana kebijakan ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sesuai potensi.

Pada penelitian terdahulu menjelaskan kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis di mana otonomi daerah sebagai jawaban atas permasalahan local terkait dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya, otonomi daerah sebagai Langkah baru dalam meningkatkan perekonomian daerah (Fatimah et al., 2020). (Fajri et al., 2019) menjelaskan otonomi daerah sebagai cara untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan warga, dan mendorong partisipasi masyarakat. Lanjutnya, diharapkan otonomi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada masyarakat dan kesejahteraannya dengan membuat pemerintah lebih efisien dalam menentukan dan menyediakan layanan publik.



Gambar 2. Vos Viewer Analysis

Sumber: Vos Viewer

<i>Theme</i>	<i>Cluster</i>
Budget impact, budget impact analysis, cost-effectiveness, budgets, cost savings, cost-benefit analysis, cost control, cost-benefit analysis, economic model, economics, health care cost, health economics, models economic, reimbursement, cost-effectiveness analysis	1
Budget control, budget, costs, environmental monitoring, investment	2
Cost, financial management, organization, and management	3
Outcome assessment	4

Pada analisis Vos Viewer terdapat korelasi antara belanja daerah dengan dampak anggaran dalam cluster 1. Kemudian cluster 2 terdapat *Budget Control* yaitu sistem pengendalian anggaran yang mencakup penganggaran, koordinasi, menetapkan tanggung jawab, perbandingan kinerja, dan memutuskan hasil untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, cluster 2 merujuk kepada narasi yang memiliki kaitan dengan belanja daerah seperti *budget, costs, environmental monitoring, investment*. Dalam penelitian sebelumnya *budget control* atau anggaran keuangan menjadi salah satu pokok pembahasan. Anggaran keuangan ini bisa dalam bentuk belanja daerah. (Putra, 2017) pengeluaran daerah dapat didefinisikan sebagai sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk mengurangi kekayaan bersih dalam satu tahun yang pembayarannya tidak dapat dipulihkan. Karena masyarakat sebagai salah satu penyandang dana publik, maka belanja daerah ini menjadi salah satu komponen penting yang dapat menarik perhatian masyarakat luas (Deviani, 2016). Menurut (Investasi et al., 2017) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan rasional secara periodik, yang merupakan komponen terpenting dalam mengatur keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah.

Peningkatan kegiatan ekonomi dalam produksi barang dan jasa ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Nawarti Bustaman, 2021) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses multidimensional yang didalamnya mencakup adanya perubahan sikap hidup, kelembagaan dan struktur. Dilansir dari teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik pemerintah tidak memiliki peran secara mendasar terkait dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Ahmad Ma'ruf, 2008). (Imamah, 2018) Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan

manusia yang akan memberikan dampak terhadap ketersediaan tenaga kerja namun tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Utami & Indrajaya, 2019) terdapat teori pertumbuhan endogen yang menjabarkan mengenai investasi di mana terdapat modal fisik dan manusia yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Dalam teori ini pemerintah memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan pengaruhnya melakukan sebuah perubahan konsumsi. Teori pertumbuhan endogen juga menjelaskan bahwa adanya infrastruktur, stabilitas politik, dan kebijakan pemerintah sebagai factor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam pengertian yang berbeda, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator dalam mengetahui kualitas kinerja perekonomian di suatu negara, terutama dalam menilai hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Apabila dalam suatu negara produksi barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa ekonomi dinegara tersebut mengalami pertumbuhan.

Dengan demikian, dalam suatu negara pertumbuhan ekonomi bisa menjadi indikator yang penting untuk melihat sejauh mana perekonomian menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Ketika perekonomian negara mengalami perkembangan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi tentunya akan menunjukkan peningkatan. Selain pertumbuhan ekonomi, belanja daerah juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya kesejahteraan masyarakat masih dipandang sebatas jargon yang belum terintegrasi dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala dalam pembangunan yang belum menyentuh persoalan yang mendasar untuk masyarakat. Kendala ini dilihat dari indikator pembangunan yang masih kurang, kurangnya fasilitas Kesehatan maupun pembangunan (Rahman, 2018). Secara umum masyarakat belum memahami pentingnya kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan masyarakat masih minim terkait dengan pemahamannya terhadap kesejahteraan masyarakat, mereka mengartikan kesejahteraan dengan pemberian bantuan ataupun uang yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah-bawah. Kenyataannya esensi kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai pemberdayaan di mana masyarakat diberi modal untuk menjalankan aktivitas ekonominya (Natalis, 2020).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan teknik *Systematic Literature Review* dengan kerangka *Narrative Policy Framework*. Studi literatur diartikan sebagai metode penelitian kepustakaan yang terdiri dari serangkaian penelitian yang menggunakan metode pengumpulan seperti data bibliografi atau temuan penelitian yang diperoleh dari dokumen, jurnal, dan buku (Yeni & Hartati, 2020). Selain itu, kajian terhadap buku dan catatan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti yang digunakan sebagai studi literatur digunakan sebagai narasi dalam mempengaruhi outcome dari pelaksanaan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2023. *Literature Review* secara sistematis ini bertujuan untuk mengkritisi pelaksanaan belanja daerah Kota Semarang yang didapat dari pencarian data berbasis akademis maupun regulative. Adapun teknik analisis data yang dilakukan berdasar pada teori Miles and Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

Kewajiban daerah yang berpengaruh terhadap penurunan nilai kekayaan bersih selama periode waktu tertentu disebut sebagai belanja daerah. Belanja daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Untuk urusan wajib, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belanja daerah dibagi menjadi lima kategori: pegawai, modal, barang jasa, hibah, dan bantuan sosial. Masing-masing pembagian belanja daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan caranya masing-masing. Hal ini dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh (Ansar dkk., 2021) yang menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga semakin besar angka belanja daerahnya maka semakin besar pula pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Belanja pegawai di Kota Semarang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena APBD memiliki proporsi belanja pegawai yang lebih tinggi. Belanja pegawai di Kota Semarang rata-rata mencapai 88,82% selama periode lima tahun mulai tahun 2018 sampai 2022. Dengan proporsi belanja pegawai yang begitu tinggi, terlihat jelas bahwa APBD digunakan untuk membiayai gaji pegawai, memungkinkan Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan gaji dari tahun ke tahun ke tahun. Upah dan bonus pegawai merupakan sumber perolehan yang akan dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh pegawai; ketika faktor ini meningkat, permintaan barang jasa akan ikut meningkat, mendorong produsen dan distributor untuk meningkatkan produksi dan distribusi. Hal ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi, yang akan meningkatkan produk bruto wilayah Kota Semarang, lanjutannya peningkatan ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi. Kemudian, belanja modal berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya permintaan barang jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Penyediaan barang dan jasa berupa pengadaan peralatan, dan infrastruktur lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi belanja barang dan jasa di Kota Semarang, anggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk menyelenggarakan acara pemerintah seperti perjalanan dinas, belanja operasional lainnya dan ATK, sehingga pada belanja barang dan jasa ini dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut (Deswantoro et al., 2017) dalam kegiatan pemerintahan juga dapat mengalami efek negative terhadap produktivitas ekonomi, efek ini membuat pemerintah melakukan ekspansi yang terus menerus sehingga menempatkan pengeluaran pada posisi yang kurang produktif dan berakibat terjadinya kegiatan yang tidak tepat sasaran. Belanja hibah di Kota Semarang dialokasikan untuk Lembaga maupun organisasi masyarakat, namun anggaran belanja hibah belum diimplementasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti bantuan modal untuk UMKM. Anggaran belanja hibah masih digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, sisi belanja bantuan sosial dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proporsi belanja bantuan sosial di Kota Semarang sebesar 72.82%, proporsi ini tentunya memiliki pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan anggaran belanja bantuan sosial memiliki sasaran untuk membantu masyarakat yang masih tergolong masyarakat kurang mampu.

Belanja Bantuan Sosial bidang risiko sosial dianggarkan untuk membantu pembiayaan pengobatan bagi masyarakat miskin yang tidak ditanggung oleh BPJS, kemudian siswa dari kalangan menengah ke bawah diberikan bantuan untuk mendanai kebutuhan sekolah dan untuk rumah tidak layak huni akan diberikan anggaran yang digunakan untuk membantu memperbaiki rumah mereka agar layak huni. Belanja bantuan sosial tidak diragukan lagi karena dapat menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini pemerintah daerah dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dengan mengurangi alokasi pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Lebih lanjut, keberadaan dana Bantuan Sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan serta dapat meningkatkan produktivitas masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian (Basuki, 2021) yang menjelaskan bahwa belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, kelautan, dan perikanan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya kurang efektif apabila untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3. Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017-2020

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Belanja Daerah yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun pada tahun selanjutnya Komposisi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Semarang memiliki porsi yang besar yakni 64,83% berbanding dengan Belanja Langsung yang diperuntukkan dalam melaksanakan berbagai program yang hanya sebesar 35,17%. Pada tahun 2021 Belanja Pemerintah Kota Semarang lebih mengalokasikan kepada belanja operasi dengan besaran angka senilai 4.105.719.754.215,00 namun hanya terealisasi sebesar 3.781.987.198.191,01. Adapun data Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Semarang tahun 2022 menunjukkan angka yang cukup menggembirakan dalam ranah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20-83,60, indeks kemiskinan kecil dengan kisaran angka sebesar 4,24-4,34%, dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang melebihi angka provinsi dan nasional yakni sebesar 8,70-9,00%.

4.2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang

Kesejahteraan menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah, permasalahan bagi negara berkembang yaitu tentang kesejahteraan masyarakatnya (Tsabit, 2019). Menurut pasal Nomor 11 Tahun 2009, masyarakat dikatakan sejahtera Ketika terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh belanja daerah. Pemerintah dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui belanja pegawai, modal, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Pertama, peningkatan belanja pegawai di Kota Semarang belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena belum dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Semarang. HDI atau *human development index* menilai kesejahteraan masyarakat dengan melihat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan ditentukan oleh kuantitas tenaga pengajar dan bobot pengajar yang ada, serta diukur dengan lama sekolah dan tahun sekolah yang diharapkan. Sedangkan bidang kesehatan diukur dengan angka harapan hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal rata-rata berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Dampak belanja modal ini karena proporsi belanja modal APBD sebesar 70,75% per tahun sejak 2018 hingga 2022. Belanja modal ini efektif digunakan untuk mengembangkan fasilitas umum seperti jembatan, pasar, sekolah, dan fasilitas masyarakat lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Berbagai jenis fasilitas umum tersebut akan membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang layak dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Selanjutnya, karena pemerintah daerah menginvestasikan modal dalam infrastruktur masyarakat, pembangunan berbagai jenis infrastruktur membutuhkan tenaga kerja yang besar. Ini akan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja bagi orang-orang, yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan belanja modal.

Pada sisi belanja barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena anggaran belanja diarahkan untuk pembiayaan kegiatan operasional yang berada di pemerintah, sehingga menyebabkan adanya pemborosan anggaran keuangan. Selanjutnya, sisi belanja hibah memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh ini dialokasikan kepada pemberian anggaran untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk UMKM. Bidang belanja bantuan sosial, dilihat dari rata-rata APBD tahun 2018-2022 sebesar 72.18% belum cukup mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Untuk itu perlu digunakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat Kota Semarang secara komprehensif. Adapun dengan memetakan masalah, fokus, serta melakukan pembatasan mengenai indikator kesejahteraan masyarakat, maka menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang membagi indikator tersebut kedalam lima bidang yaitu:

- 1) Indikator Bidang Pendidikan;
- 2) Indikator Bidang Kesehatan dan Gizi;
- 3) Indikator Bidang Kependudukan;
- 4) Indikator Bidang Perumahan;

5) Indikator Bidang Ketenagakerjaan.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur bidang Pendidikan adalah kemampuan baca tulis atau Angka Melek Huruf (AMH). Kota Semarang pada tahun 2021 bagi penduduk usia 15 tahun keatas adalah 98,18 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 98,24. Sehingga tahun 2022 diperkirakan sekitar 98% masyarakat Kota Semarang yang berumur 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis dengan baik. Dalam Bidang Kesehatan dan Gizi ukuran yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Ukuran yang digunakan tersebut dapat mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Dengan demikian program pembangunan kesehatan diperlukan apabila AHH di daerah tersebut sangat rendah. Adapun Angka Harapan Hidup Kota Semarang secara grafik menunjukkan peningkatan dari tahun ketahunnya sampai pada tahun 2022 mencapai angka 77,51. Selain itu, hal lain yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat adalah potensi perekonomian yang mampu menyerap secara efektif tenaga kerja.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa belanja daerah di Kota Semarang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduknya. Belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Pengeluaran untuk barang dan jasa memiliki dampak negatif, seperti halnya pengeluaran untuk hibah. Dari sisi belanja barang dan jasa menunjukkan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, lanjutnya, menambahkan peningkatan belanja hibah dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, belanja pegawai, modal, dan hibah berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian masalah belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial yang keduanya berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

References

- Ahmad Ma'ruf. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Akhmad Ansar, Muhammad Hidayat, F. (2021a). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Dimoderasi Belanja Modal Di Kabupaten Kepulauan Selayar. *NMaR Nobel Management Review*, 2(2), 59–72.
- Akhmad Ansar, Muhammad Hidayat, F. (2021b). PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN DIMODERASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 2303–1255.
- Basuki, A. T. (2021). Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi*, 18(2), 121. <https://doi.org/10.31315/be.v18i2.5601>
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13.
- Ekonomi Pembangunan Fak Ekonomi dan Bisnis, P. (2021). Pengaruh belanja daerah

- terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Rizky Airy Putri*; Zamzami; Selamat Rahmadi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 2303–1255.
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. (2019). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99–107.
- Imamah, N. (2018). Dampak Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Persamaan Simultan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(2), 51–65.
- Investasi, P., Pembangunan, P., Tenaga, J., Primasari, L., Ekonomi, F., & Udayana, U. (2017). *ISSN 2303-017 KERJA , PELATIHAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ABSTRAK* Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional . *Pertumbuha*. 2371–2397.
- Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6), 1390–1422.
- Lamaya, F., & Mei, N. N. (2021). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Flores Timur. *Akuntansi*, 8(2), 43–49.
- Makka, H. Al, Saerang, D. P. ., & Elim, I. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 324–333.
- Mudhofir, F., Yulianti1, I., & Sujarwata. (2018). *Jurnal Mipa Uns*. 41(1), 1–5.
- Natalis, A. (2020). Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 64–73. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205>
- Nawarti Bustaman, D. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–92.
- Pertumbuhan, T., Di, E., & Mimika, K. (2019). *ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MIMIKA Salbia Taher 1) ,Antje Tuasela 2) 1. 3*, 40–58.
- Putra, S. K. (2017). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014)*. 5(2).
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Semarang, B. P. S. K. (2022). *Ekonomi Kota Semarang Tahun 2022*. 88.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol 18(No 2), 63–78.
- Sukmawati, M. M. dan A. M. (2016). *Kajian Ekonomi Terkait Visi Rpjmd Kota Semarang*. 10(1).
- Tahun, L. B., Fatimah, S., Hasbullah, Y., & Mataram, U. (2020). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan*. 6(2), 1–27.
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *AMAL:Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–17.
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(10), 2195–2225.
- Yeni, A., & Hartati, S. (2020). Studi Literatur: Stimulasi Kemampuan Anak Mengenal Huruf Melalui Permainan Menguraikan Kata Di Taman Kanak-Kanak Alwidjar Padang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 608–616.

